P U T U S A N
No. 1904 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HENDRO ROESTANTO, bertempat tinggal di Anjasmoro Tengah V No. 26, Karanganyar, Semarang Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SITI BADRIYAH, SH.**, Advokat, berkantor di Komplek Anjasmoro 11 F1 Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Agustus 2005, Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Turut Terbanding ;

m e l a w a n :

1. **EDY ROESTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kukilo Mukti Raya No. 191, Pedurungan Kidul, Semarang ;
2. **TEGUH HERTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Taman Semeru I No. 5, Karangrejo, Semarang ;
3. **TANTY ANGGRAINI**, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono No. 9, gubug, Purwodadi/Grobogan ;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. ABDURROCHIEM ASNAWEI, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Kukilo Mukti Raya No. 191 Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2005, para Termohon Kasasi I juga para Pemohon Kasasi II dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

d a n :

LINDAWATI, bertempat tinggal di Komplek Puri Anjasmoro, Blok B-9 No. 7, Tawangmas, Semarang Barat, Turut Termohon Kasasi juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi juga para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa antara Para penggugat dengan Tergugat I adalah saudara kandung yaitu anak dari orang tua bersama TAN ENG LOE dan Ny. ANGGRAINI TIRTONINGSIH, sedangkan Tergugat II adalah saudara IPAR yaitu isteri dari Tergugat I ;

Bahwa sesudah perkawinan Tergugat I dan Tergugat II, antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah melakukan hubungan hukum yaitu Tergugat I meminjam uang kepada Para Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar) dan rinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Tanggal 23 Maret 2001, meminjam kepada Penggugat I, sejumlah Rp.180.000.000,- ;
- b. Tanggal 17 Oktober 1999, meminjam kepada Penggugat II, sejumlah Rp.145.000.000,- ;
- c. Tanggal 4 Agustus 2003, meminjam kepada Penggugat II, sejumlah Rp.120.000.000,- ;
- d. Tanggal 19 September 2000, meminjam kepada Penggugat III, sejumlah Rp.190.000.000,- ;
- e. Tanggal 2 April 2001, meminjam kepada Penggugat III, sejumlah Rp.95.000.000,- ;
- f. Tanggal 7 Nopember 2002, meminjam kepada Penggugat III, sejumlah Rp.180.000.000,- ;
- g. Tanggal 9 Pebruari 2003, meminjam kepada Penggugat III, sejumlah Rp.90.000.000,- ;

Bahwa uang hasil pinjaman tersebut oleh Tergugat I dijadikan Modal usaha dalam mengembangkan perusahaan yang bergerak di Bidang Jasa

Expedisi yaitu diberi nama Perseroan Terbatas (PT) BERMUDA CEMERLANG ABADI berkedudukan di Kota Semarang yang saat ini berkedudukan kantor di Puri Anjasmoro Blok F1 No. 11 Kota Semarang ;

Bahwa ternyata selama perusahaan milik Tergugat I tersebut berjalan, ternyata hutang yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar) tersebut belum dibayar seluruhnya karena Tergugat I baru melaksanakan pembayaran berjumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Tergugat dijanjikan akan dibayar sesuai dengan SURAT PERNYATAAN tertanggal 16 PEBRUARI 2004, akan tetapi setelah jatuh temponya ternyata Tergugat I WANPRESTASI yaitu tidak melaksanakan kewajibannya, sedangkan Tergugat II merasa tidak memiliki kewajiban hutang tersebut karena seluruh keuangan dipergunakan oleh Tergugat I ;

Bahwa ternyata antara Tergugat I dengan Tergugat II timbul permasalahan keluarga yaitu terjadi perselisihan rumah tangga, dan Para Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikannya, namun selalu gagal dan kenyataan yang sekarang terjadi adalah antara Tergugat I dengan Tergugat II terjadi gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Semarang yang saat ini dalam proses persidangan;

Bahwa akibat terjadi perselisihan rumah tangga yang terjadi dalam rumah tangga Para Tergugat itu, Para Penggugat merasa dirugikan karena uang PINJAMAN yang seharusnya menjadi kewajiban bersama antara Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi sisa pinjaman sejumlah Rp. 875.000.000,- tersebut, akibatnya Tergugat I selalu menunda-nunda pembayarannya dengan alasan masih terjadi masalah keluarga, sedangkan Tergugat II beralasan bahwa uang tersebut seluruhnya dipergunakan Tergugat I, dengan demikian Para Tergugat sudah beriktikad tidak baik dan telah WANPRESTASI menurut hukum, oleh karenanya Para penggugat berhak melakukan gugatan ini ;

Bahwa oleh karena iktikad para Tergugat sudah nyata yaitu sengaja tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka Para Penggugat khawatir terjadi peralihan hak atas harta kekayaan milik Para Tergugat kepada Pihak lain tanpa

sepengetahuan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dengan ini terpaksa memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menetapkan memerintahkan diletak SITA JAMINAN (conservatoir beslaag) terhadap harta milik Para Tergugat tersebut baik berupa tanah dan bangunan rumah serta harta bergerak lainnya berupa beberapa unit mobil yang dikuasai Para Tergugat dan mohon penyitaan jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga menurut hukum;

Bahwa oleh karena secara materiil maupun formil perbuatan Tergugat I dilakukan secara sah dan diketahui Tergugat II, maka sekalipun antara Tergugat I dan Tergugat II terjadi perceraian, hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak putus karena perceraian itu dan hubungan hukum secara perdata tentang hutang-piutang tersebut tetap melekat dan wajib dibayar oleh Para Tergugat ;

Bahwa tindakan hukum Tergugat I yaitu membuat Surat Pernyataan aquo adalah sah dan bilamana Tergugat II tidak membubuhkan tandatangannya adalah tidak menyebabkan batalnya pembayaran hutang sejumlah Rp.125.000.000,- kepada para Penggugat dengan konsekwensi logisnya adalah secara hukum pembayaran hutang sejumlah Rp.125.000.000,- dari Tergugat I kepada Para Penggugat tersebut adalah sah menurut hukum, dengan demikian sudah nyata dan jelas bahwa Para Tergugat masih memiliki sisa hutang berjumlah Rp. 875.000.000,-;

Tergugat II sudah jelas dan nyata menyatakan berkeberatan dan tidak bersedia membayar sisa hutang tersebut kepada Para Penggugat, sedangkan niatan Tergugat I akan membayar namun menunda-nunda saja adalah merupakan upaya Tergugat I agar dianggap sedang mengalami kesulitan saja, mohon agar alasan-alasan yang demikian itu dikesampingkan dan ditolak, karena perbuatan yang demikian itu merupakan upaya menghindari tanggung jawab hukum saja (wanprestasi), oleh karenanya kepada para Tergugat sudah patut untuk dihukum untuk membayar sisa hutang tersebut di atas ;

Bahwa mengingat Penggugat seharusnya sudah menerima pembayaran hutang sebesar Rp. 875.000.000,- yaitu pada tanggal 16 PEBRUARI 2004, maka atas kelambatan pembayaran itu sudah patut apabila para Penggugat menuntut pembayaran denda sebesar 5 (lima) persen setiap bulan terhitung sejak tanggal 16 PEBRUARI 2004 sampai gugatan ini ditandatangani yaitu tanggal 16 Agustus 2005, yaitu selama (18 Bulan) X 5 % X Rp. 875.000.000,- = Rp. 787.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian hutang Para Tergugat adalah Rp. 875.000.000,- + Rp.787.500.000,- = Rp. 1.662.500.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan seluruhnya adalah menjadi kewajiban yang wajib dibayar oleh Para Tergugat ;

Bahwa karena adanya perbuatan wanprestasi dari Tergugat I, Tergugat II tersebut akibatnya Para Penggugat dirugikan dan kehilangan keuntungan yang seluruhnya wajib dibayar yaitu seluruh tagihan sebesar Rp.1.662.500.000,- ;

Bahwa secara yuridis Para Tergugat adalah bertanggung jawab secara hukum atas pembayaran hutang tersebut dan ternyata Para Tergugat sampai sekarang tidak melakukan kewajibannya dengan baik, maka Para Penggugat secara yuridis mengajukan gugatan terhadap para Tergugat adalah sudah tepat dan gugatan tersebut dibuat secara sempurna yaitu posita dan petitumnya sangat bersesuaian, obyek gugatan jelas dan subyek hukumnya tepat, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak mengalami cacat formal ;

Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam gugatan ini diajukan dengan cukup bukti yang sempurna, maka untuk dapat dipenuhi pembayaran hutang berikut kerugiannya oleh Para Tergugat, Para Penggugat mohon agar ditetapkan bahwa terhadap asset yang berupa tanah dan bangunan serta harta bergerak lainnya tersebut pada posita gugatan butir nomor 7 (tujuh) tersebut maka pelaksanaan pembayaran hutang serta denda tersebut, mohon terhadap HARTA MILIK Para Tergugat yang menjadi obyek sita jaminan tersebut dijual dimuka umum (LELANG) yang hasilnya dibayarkan kepada para Penggugat

dan sisanya dipergunakan membayar biaya perkara dan kalau masih ada sisa mohon dikembalikan kepada yang berhak ;

Bahwa mengingat kedudukan para Tergugat maupun obyek sengketa dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka Pengadilan Negeri Semarang adalah berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus gugatan perkara ini ;

Bahwa gugatan ini adalah beralasan hukum dan dikuatkan alat bukti autentik yang sempurna, maka sudah sepatutnya putusan atas gugatan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada verzet, banding, kasasi ;

Bahwa Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum membayar biaya perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah telah wanprestasi dan merugikan para Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki hutang yaitu kewajiban membayar hutang pokok kepada para Penggugat sebesar Rp.875.000.000,- dan denda sebesar Rp.787.500.000,- yang hingga kini seluruhnya berjumlah Rp.1.662.500.000,- yang wajib dibayar oleh para Tergugat tersebut di atas kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik para Tergugat yang telah dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Semarang tersebut ;
5. Menghukum Tergugat I bersama Tergugat II untuk membayar kewajiban yaitu membayar hutang pokok sebesar Rp.875.000.000,- dan denda sebesar Rp.787.500.000,- yang kesemuanya berjumlah Rp.1.662.500.000,- secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat

5. Menghukumi para tergugat dengan cara menjual dimuka umum (lelang) atas harta kekayaan yang telah dilaksanakan sita jaminan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang tersebut dan hasilnya untuk membayar kewajiban tersebut kepada para Penggugat dan sisanya dipergunakan membayar biaya-2 lelang dan dikembalikan kepada yang berhak ;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada verzet, banding, kasasi ;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini ;

Dan/atau, setidaknya, pengadilan tersebut menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana (Ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 145/PDT.G/2005/PN.SMG. tanggal 27 Pebruari 2006 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan II telah cidera janji (wanprestatie) ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng sisa utang pokok sebesar Rp.787.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan denda sebagai ganti kerugian atau bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung gugatan terdaftar sampai sisa utang pokok dibayar lunas kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
- Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Penetapan No. 145/Pdt/G/2005/PN.Smg berikut Berita Acara Sita Jaminan No. 145/Pdt/G/2005/PN.Smg adalah sah dan berharga ;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.358.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II/ Pembanding putusan Pengadilan - Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 205/PDT/2006/PT.SMG. tanggal 22 Januari 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Pebruari 2006 No. 145/Pdt.G/2005/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I/Turut Terbanding telah melakukan wanprestasi yang merugikan para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I memiliki hutang yaitu kewajiban membayar hutang pokok kepada para Penggugat sebesar Rp.875.000.000,- dan denda sebesar Rp.78.750.000,- yang seluruhnya berjumlah Rp.953.750.000,- yang wajib dibayar oleh Tergugat I kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kewajiban hutang pokok sebesar Rp.875.000.000,- dan denda sebesar Rp.78.750.000,- secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat;
5. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) berdasarkan Penetapan No. 145/Pdt.G/2005/PN.Smg. berikut berita acara sita jaminan No. 145/Pdt.G/

2005/PN.Smg. adalah tidak sah dan berharga oleh karenanya harus diangkat;

6. Menghukum Tergugat I/Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat banding sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Turut Terbanding pada tanggal 3 April 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 April 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 145/Pdt.G/2005/PN.Smg. Jo. No. 06/Pdt.K/2007/ PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 April 2007;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 4 April 2007 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 April 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 145/Pdt.G/2005/PN.Smg. Jo. No. 07/Pdt.K/2007/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 April 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 21 Mei 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Turut Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Mei 2007;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat II/Pembanding yang pada tanggal 14 Mei 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Pemohon Kasasi I/Tergugat I :

Bahwa Judex Facti dalam putusan Pengadilan Tinggi halaman 3, 4, 5 dan 6 a quo menerangkan bahwa :

Pertimbangan hukum tentang EKSEPSI dalam Putusan halaman 3 :

Bahwa tentang Eksepsi, dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat II, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dan oleh sebab itu eksepsi Tergugat II harus ditolak ;

Tanggapan Pemohon Kasasi :

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Facti mengenai eksepsi Tergugat II tersebut, Pemohon Kasasi sependapat karena pengambil alihan atas pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan a quo adalah tidak melanggar hukum acara perdata ataupun peraturan hukum yang berlaku, oleh karenanya dalam Tingkat Kasasi Pemohon Kasasi mohon agar pertimbangan hukum Judex Facti tentang EKSEPSI Tergugat II tersebut dipertahankan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Tingkat Kasasi ;

Pertimbangan hukum tentang POKOK PERKARA dalam putusan halaman 4, 5; Bahwa, Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangan hukum pada halaman 4 alinea kedua menerangkan bahwa tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menerangkan bahwa sekalipun Tergugat II tidak pernah menyetujui Tergugat I berhutang pada Para Penggugat, namun uangnya dipergunakan untuk keperluan keluarga dan biaya operasional perusahaan yang menjadi sumber penghasilan keluarga maka patut dipersangkakan Tergugat II secara diam-diam menyetujui pinjam-meminjam yang dilakukan Tergugat I, dengan demikian dalil Tergugat II harus ditolak dan Tergugat II juga dinyatakan bertanggungjawab atas hutang-hutang tersebut dan juga harus dinyatakan wanprestasi (CIDERA JANJI) ;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat menyetujui sebab sejak terjadi kemelut rumah tangga antara Tergugat I dan Tergugat II tidak harmonis lagi, maka pengakuan Tergugat I atas pinjaman-pinjaman tersebut tidaklah dapat mengikat pada Tergugat II melainkan hanya mengikat diri dan menjadi tanggung jawab Tergugat I sendiri, dengan demikian terhadap Tergugat II agar dihukum membayar sisa hutang pokok sebesar Rp.875.000.000,- adalah tidak dapat dikabulkan dan secara hukum tidak turut bertanggung jawab karena tidak terbukti mengetahui atau menyetujui adanya pinjaman tersebut baik secara diam-diam ataupun secara jelas dan terang, sehingga tuntutan Para Penggugat hanya dapat dikabulkan terhadap diri Tergugat I saja sedangkan tentang denda 6% pertahun sehingga dihitung menjadi 18 bulan X 6% per tahun X Rp. 875.000.000,- = Rp. 78.750.000,- haruslah dibebankan kepada Tergugat I yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus ;

Tanggapan Pemohon Kasasi : *Memohon Kasasi* ;

Memohon Kasasi ;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusan a quo adalah telah salah dan keliru dalam penerapan hukum dan juga tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) sebab:

Secara yuridis dalam Undang-Undang Perkawinan dikenal adanya harta bersama dan atau gono-gini, sebagaimana diatur dalam Bab VII Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Jo Pasal 36 ayat 1 dan ayat 2, yang pada pokoknya menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dalam hal ini juga berarti bahwa hutang Tergugat I sejumlah Rp.1.000.000.000,= tersebut secara yuridis merupakan hutang yang berlangsung selama dalam perusahaan sehingga menjadi harta yang statusnya menjadi harta bersama ;

Bahwa dengan demikian sebagai konsekwensi yuridisnya adalah hutang yang diperjanjikan oleh Tergugat I adalah juga menjadi hutang bersama dan merupakan kewajiban bersama pula yaitu Tergugat II ikut bertanggung jawab untuk membayarnya sampai lunas kepada Para Penggugat tersebut ;

Bahwa disamping alasan tersebut ternyata antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak diikat dengan suatu Perjanjian Pisah harta selama perkawinan, oleh karenanya dalam hal ini baik perolehan harta dalam bentuk keuntungan maupun kerugian adalah menjadi kewajiban bersama, apalagi pada saat terjadinya hutang-piutang tersebut bahkan sampai adanya putusan ini antara Tergugat I dengan Tergugat II masih sah sebagai SUAMI-ISTERI, dengan demikian apabila diperhatikan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 a quo yang menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sedangkan fakta yuridis membuktikan bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II sampai sekarang belum ada putusan cerai yang memiliki kekuatan hukum tetap (BHT) dengan demikian kewajiban membayar sisa hutang sejumlah Rp.953.000.000,- tersebut merupakan kewajiban bersama Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa oleh karenanya, secara nyata Judex Facti telah terbukti melakukan kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum dalam putusan a quo, sehingga putusan Pengadilan Tinggi a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Tingkat Kasasi dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang a quo;
Pemohon Kasasi II/Para Penggugat :

Pertimbangan hukum tentang EKSEPSI dalam Putusan halaman 3 :

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi halaman 3 a quo yaitu tentang Eksepsi, dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat II, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dan oleh sebab itu eksepsi Tergugat II harus ditolak ;

Tanggapan Para Pemohon Kasasi :

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Facti mengenai eksepsi Tergugat II tersebut, Para Pemohon Kasasi sependapat karena pengambil alihan atas pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah tidak dilarang dalam hukum acara perdata yang berlaku, oleh karenanya dalam Tingkat Kasasi Para Pemohon Kasasi mohon agar pertimbangan hukum tentang EKSEPSI Tergugat II tersebut dipertahankan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi ;

Pertimbangan hukum tentang POKOK PERKARA :

Bahwa, dalam putusan Pengadilan Tinggi halaman 4, 5 dan 6 a quo, diterangkan bahwa Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangan hukum yaitu pada alinea kedua menerangkan bahwa tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menerangkan bahwa sekalipun Tergugat II (LINDAWATI) tidak pernah menyetujui Tergugat I (HENDRO ROESTANTO) berhutang pada Para Penggugat, namun uangnya dipergunakan untuk keperluan keluarga dan biaya operasional perusahaan yang menjadi sumber penghasilan keluarga maka patut dipersangkakan Tergugat II secara diam-diam menyetujui

pinjam-meminjam yang dilakukan Tergugat I, dengan demikian dalil Tergugat II harus ditolak dan Tergugat II juga dinyatakan bertanggung jawab atas hutang-hutang tersebut dan juga harus dinyatakan wanprestasi (CIDERA JANJI) ;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat menyetujui sebab sejak terjadi kemelut rumah tangga antara Tergugat I dan Tergugat II tidak harmonis lagi, maka pengakuan Tergugat I atas pinjam meminjam tersebut tidaklah dapat mengikat pada tergugat II melainkan hanya mengikat diri dan menjadi tanggung jawab Tergugat I sendiri, dengan demikian terhadap tergugat II agar dihukum membayar sisa hutang pokok sebesar Rp.875.000.000,- adalah tidak dapat dikabulkan dan secara hukum Tergugat II (LINDAWATI) adalah tidak turut bertanggung jawab karena tidak terbukti mengetahui atau menyetujui adanya pinjaman tersebut baik secara diam-diam ataupun secara jelas dan terang, sehingga tuntutan Para Penggugat hanya dapat dikabulkan terhadap diri tergugat I saja sedangkan tentang denda 6% pertahun sehingga dihitung menjadi 18 bulan X 6% per tahun X Rp.875.000.000,- = Rp.78.750.000, haruslah dibebankan kepada Tergugat I yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus ;

Tanggapan Para Pemohon Kasasi :

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* adalah telah salah dan keliru dalam penerapan hukum dan juga tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) sebab :

Bahwa didalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dikenal istilah adanya harta bersama (*gono-gini*), yaitu sebagaimana diatur dalam Bab VII Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Jo Pasal 36 ayat 1 dan ayat 2, yang mana dalam pasal-pasal tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ;

Bahwa secara nyata telah terungkap dalam persidangan yaitu adanya fakta hukum tetap berupa keberadaan hutang keluarga sejumlah Rp.1.000.000.000,- dan terjadi pada saat Tergugat I dengan Tergugat II menjadi suami isteri ;

Bahwa hasil uang hutang sejumlah Rp.1.000.000.000,- tersebut secara yuridis adalah menjadi perolehan harta didalam perkawinan dan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut statusnya adalah menjadi harta bersama ; Bahwa dengan demikian sebagai konsekwensi yuridisnya adalah berlaku kaedah hukum yaitu hutang sejumlah Rp.1.000.000.000,- adalah menjadi hutang bersama sebab merupakan kewajiban bersama untuk memikul beban dan tanggung jawab membayar hutang sejumlah Rp.1.000.000.000,- tersebut ; Bahwa ternyata antara Tergugat I dengan Tergugat II secara yuridis tidak diikat dengan suatu Perjanjian Pisah harta selama perkawinan, dengan demikian secara yuridis yaitu berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dan adanya fakta bahwa uang hasil hutang sejumlah Rp.1.000.000.000,- tersebut digunakan untuk keperluan bersama yaitu membeli mobil (diakui Tergugat II) dan untuk operasional perusahaan yang menjadi sumber penghasilan keluarga tersebut, maka menurut hukum adalah Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama berkewajiban memenuhi kewajiban mengembalikan uang pinjaman yang dalam persidangan telah terbukti berjumlah Rp.953.000.000,- ; Bahwa oleh karenanya perolehan harta dari pinjaman yang berakibat terjadi suatu keuntungan maupun kerugian adalah menjadi resiko bersama dan menjadi kewajiban bersama untuk membayar hutang tersebut, apalagi pada saat terjadinya hutang piutang tersebut bahkan sampai adanya putusan ini antara Tergugat I dengan Tergugat II masih sah sebagai SUAMI ISTERI ; Bahwa dengan memperhatikan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sedangkan dalam persidangan terungkap adanya fakta yuridis membuktikan bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II sampai sekarang belum ada putusan cerai yang memiliki kekuatan hukum tetap (BHT) dengan demikian kewajiban membayar sisa hutang sejumlah Rp.953.000.000,- tersebut merupakan kewajiban bersama Tergugat I dan Tergugat II ;

Berdasarkan fakta hukum tersebut telah nyata *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukumnya, sehingga putusan Pengadilan Tinggi a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang a quo diperbaiki secara benar dan adil oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam pertimbangan hukumnya, tentang tidak adanya tanggung jawab dari Tergugat II atas adanya hutang Pemohon Kas yang hanya didasarkan pada bukti P.6 (Surat Pernyataan) dengan menafsirkan sebagai suatu pengakuan adalah bukti sempurna ;

Berdasarkan fakta hukum/fakta di persidangan :

1. Pemohon Kasasi kawin dengan Tergugat II (asal) pada tahun 1989, dan mengajukan perceraian pada tanggal 27 Juli 2005 dan telah diputus pada tanggal 28 September 2005 No. 132/Pdt/G/2005/PN.Smg. ;
2. Bahwa hutang-hutang Pemohon Kasasi yang dibuat/dipergunakan untuk usaha telah terjadi sejak tahun 1999 sampai dengan 2003 (P.1 s/d P.5) yaitu pada waktu perkawinan masih utuh ;
3. Bukti P.1 s/d P.5 diterangkan dalam bukti P.6 ;
4. Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi hutang-hutang tersebut terjadi pada saat perkawinan berlangsung ;

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Jo. Pasal 36 ayat 1 dan ayat 2, dengan penafsiran a contrario, maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama ;

Bahwa Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan hukumnya; serta benar dalam penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : HENDRO ROESTANTO, dan Pemohon Kasasi II : 1. EDY ROESTANTO, 2. TEGUH HERTANTO, 3. TANTY ANGGRAINI, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 205/PDT/2006/PT.SMG. tanggal 22 Januari 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/PDT.G/2005/PN.SMG. tanggal 27 Pebruari 2006 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I : HENDRO ROESTANTO, dan Pemohon Kasasi II : 1. EDY ROESTANTO, 2. TEGUH HERTANTO, 3. TANTY ANGGRAINI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 205/PDT/2006/PT.SMG. tanggal 22 Januari 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/PDT.G/2005/PN.SMG. tanggal 27 Pebruari 2006 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;

- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan II telah cidera janji (wanprestatie) ;
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng sisa utang pokok sebesar Rp.787.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan denda sebagai ganti kerugian atau bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung gugatan terdaftar sampai sisa utang pokok dibayar lunas kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
 - Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Penetapan No. 145/Pdt/G/2005/PN.Smg berikut Berita Acara Sita Jaminan No. 145/Pdt/G/2005/PN.Smg adalah sah dan berharga ;
 - Menolak gugatan para Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 16 September 2008** oleh **Andar Purba, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.** dan **Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Tend Muslinda, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./Prof. DR. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

K e t u a ;

Ttd./Andar Purba, SH.

Biaya kasasi ;

- 1. Meterai.....Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
- 3. Administrasi kasasi,Rp. 493.000,-
- Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO SH.,MH

NIP. 040044809.

**PERCERAIAN TIDAK MENGAKIBATKAN SALAH SATU PIHAK,
DIBEBASKAN DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR HUTANG, YANG
DIBUAT PADA SAAT MASIH TERIKAT DALAM PERKAWINAN**

POSISI KASUS :

- Bahwa para Penggugat dengan Tergugat I adalah bersaudara kandung, sedangkan Tergugat II adalah isteri Tergugat I ;
- Bahwa sesudah Tergugat I dan Tergugat II melakukan perkawinan, dengan alasan untuk mengembangkan perusahaan ekspedisinya, tergugat I telah meminjam uang kepada para Penggugat dengan beberapa kali pinjaman, sejak tanggal 17 Oktober 1999 s/d 9 Februari 2003, kesemuanya sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan telah dikembalikan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga sisa yang belum dibayar sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Tergugat II tidak bertanggung - jawab terhadap hutang-hutang tersebut, karena seluruh keuangan dipergunakan oleh Tergugat I ;
- Bahwa saat diajukan gugatan, antara Tergugat I dan Tergugat II sedang terjadi proses perceraian di Pengadilan Negeri Semarang ;
- Bahwa untuk menjamin dapat dipenuhinya kewajiban pembayaran hutangnya, para Penggugat telah memohon untuk dilakukan sita jaminan terhadap asset berupa tanah dan bangunan milik para Tergugat ;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang, dalam putusan nomor : 145/Pdt.G/2005/PN.Smg., tanggal 27 Februari 2006, telah memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, diantaranya, menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang pokok sebesar Rp. 787.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bunga morotair sebesar 6% (enam persen) per tahun, sejak gugatan didaftarkan sampai dibayar lunas; dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan ;

- Bahwa tergugat II melakukan upaya hukum banding dan Pengadilan Tinggi Semarang, dalam putusan No. 205/Pdt/2006/PT.Smg., tanggal 22 Januari 2007, telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang dan mengadili sendiri diantaranya adalah menyatakan Tergugat I memiliki hutang sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan denda sebesar Rp. 78.750.000 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada para tergugat dan menghukum Tergugat I membayar hutang tersebut kepada para Penggugat; menyatakan sita jaminan tidak sah dan tidak berharga dan harus diangkat ;
- Bahwa para Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung RI, dan dengan putusan No. 1904 K/Pdt/2007 tanggal 16 September 2008, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Semarang ;

MAHKAMAH AGUNG RI

Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara ini, telah memberikan alasan-alasan hukum dalam pertimbangannya, yaitu :

- Pemohon kasasi kawin dengan Tergugat II (asal) pada tahun 1989 dan mengajukan perceraian pada tanggal 27 Juli 2005 dan telah diputus pada tanggal 28 September 2005 No. 132/Pdt.G/2005/PN.Smg. ;
- Bahwa hutang-hutang pemohon kasasi yang dibuat / digunakan untuk usaha, telah terjadi sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi, hutang-hutang tersebut terjadi pada saat perkawinan berlangsung ;
- Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dengan penafsiran a Contrario, maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan / selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama;
- Bahwa Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan hukumnya, serta benar dalam penerapan hukumnya ;

- Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, dapat diangkat kaidah hukum sebagai berikut :
 - Mahkamah Agung berpendapat, bahwa hutang yang dibuat oleh para pihak pada saat perkawinan sedang berlangsung, maka hutang tersebut menjadi beban dan tanggung jawab bersama, sehingga sifa jaminan terhadap harta bersama (gono-gini) adalah sah dan berharga;

(H. Soeroso Ono, SH., MH)

- Pengadilan Negeri Semarang
No. 145/Pdt.G/2005/PN.Smg.
Tanggal 27 Februari 2006 ;
- Pengadilan Tinggi Semarang
No. 205/Pdt/2006/PT.Smg.
Tanggal 22 Januari 2007 ;
- Mahkamah Agung RI
No. 1904 K/Pdt/2007
Tanggal 16 September 2008 ;
Susunan Majelis :
Ketua Majelis : ANDAR PURBA, SH.
Anggota : -PROF.DR.VALERINE J.L.KRIEKHOFF,SH.,MA.
 -PROF, REHNGENA PURBA, SH., MS.
Panitera Pengganti : HJ. TENRI MUSLINDA, SH., MH.